

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, dan lain-lain. Mereka dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian atau pembuatan karya ilmiah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kajian pustaka sangat penting dalam proses penelitian karena karya tulis yang digunakan dapat menyimpang dari topik penelitian dan menghasilkan hasil yang kurang baik. Tanpa kajian pustaka, penulis atau bahkan pembaca akan kesulitan memahami bagaimana proses penelitian dilakukan secara keseluruhan dan tujuan awalnya tidak tercapai.

##### **2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu yang menggambarkan tentang penemuan- penemuan yang relevan dengan fokus permasalahan yang dikaji peneliti. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan peneliti sehingga permasalahan yang dikaji layak untuk dijadikan topik penelitian karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulunya sebagai berikut:

1. Anggun Tasya. Skripsi (2023) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat”.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sendiri hakekatnya untuk membantu masyarakat miskin di kampung ataupun pedesaan, BLT-DD sendiri adalah Program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa lalu di kelola oleh pemerintahan desa untuk disalurkan kepada masyarakat miskin di desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dapat di katakan belum efektif karena sebagai berikut a. keterlambatan pencairan dana sehingga penyaluran dilakukan tiga bulan sekali dan tidak semua masyarakat tergolong miskin yang menerima bantuan tersebut. b. pendataan yang sulit dilakukan karena kondisi wilayah serta prasarana jalan yang terbatas di desa tersebut. c. pemahaman masyarakat yang masih kurang dimana masyarakat tidak datang dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Karya Maju terkait dengan bantuan langsung tunai (Tasya, 2023).

Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah dikemukakan tersebut, ada kesamaan dan perbedaan dari hasil dan kesimpulan yang disampaikan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya adalah mengkaji tentang Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pada penelitian ini sama-sama menjabarkan bagaimana Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar efektif dalam ketepatan sasaran dan sosialisasi Program. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Anggun Tasya untuk lokus penelitiannya di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, sedangkan penelitian yang dilakukan Peneliti di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.

2. Risnawati et al. (2023) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pengukuran efektivitas berdasarkan indikator Campbell, yaitu keberhasilan Program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap Program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Program BLT Dana Desa di Desa Latimojong telah berjalan secara efektif.

Pelaksanaan penyaluran bantuan telah mengikuti ketentuan pemerintah pusat, sasaran Penerima manfaat sudah sesuai dengan kriteria keluarga miskin

terdampak COVID-19, dan masyarakat merasa puas karena bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan ekonomi mereka selama pandemi. Selain itu, output Program sejalan dengan input yang direncanakan sehingga tujuan Program BLT Dana Desa secara keseluruhan dapat tercapai. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sebagian masyarakat yang memprotes karena merasa berhak menerima bantuan, serta terdapat keterlambatan pencairan dana pada beberapa periode. Penelitian ini relevan sebagai rujukan dalam menganalisis efektivitas Program bantuan sosial di tingkat desa, khususnya terkait ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaannya.

3. Hadi et al. (2025) dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Sungai Kuini Dan Banyu Tajun Hilir)”.

“Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara” merupakan salah satu penelitian yang relevan dan memberikan kontribusi penting dalam kajian efektivitas kebijakan bantuan sosial di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Program BLT secara langsung di lapangan. Penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara detail pelaksanaan Program, baik dari unsur pemerintah desa maupun masyarakat Penerima bantuan. Sebanyak 14 informan dilibatkan, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan Model Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan analisis tersebut, peneliti berupaya mengungkap gambaran nyata tentang efektivitas Program BLT Dana Desa di dua Desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Desa Sungai Kuini dan Desa Banyu Tajun Hilir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa masih berada pada kategori kurang efektif, terutama dilihat dari indikator efektivitas yang digunakan, yaitu pemahaman Program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Salah satu temuan penting adalah, bahwa sebagian masyarakat belum memahami Program secara menyeluruh karena sosialisasi dari pemerintah desa masih terbatas. Selain itu, ketepatan waktu penyaluran bantuan juga belum optimal, ditandai dengan keterlambatan pencairan yang sering terjadi akibat kendala administratif pada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pada aspek ketepatan sasaran, terdapat warga yang memenuhi kriteria namun tidak menerima bantuan karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh peraturan pusat.

Walaupun demikian, penelitian tersebut juga menemukan, bahwa Program BLT tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Penerima, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Koordinasi internal antara perangkat Desa, RT, dan BPD juga dinilai cukup baik dan menjadi salah satu faktor pendukung keberjalanan Program. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait kriteria Penerimaan, tidak

adanya ketentuan tanggal pembagian yang jelas, serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas Program secara menyeluruh.

**Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Permasalahan Dan Perbedaan			
			Teori yang Dipakai	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Anggun Tasya	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat	Efektivitas Makmur (2010)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	- Pengumpulan Data - Reduksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan
2.	Risnawati	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang	Campbell dalam Khoeriyah et al., (2021)	Kualitatif	Deskriptif	- Reduksi Data - Penyajian Data - Menyimpulkan Data
3.	Novi Hadi, Ni Made Musiyani Anjasmari, Moh. Fajar Noorrahman	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Sungai Kuini Dan Banyu Tajun Hilir)	Edy Sutrisno yang dijelaskan dalam (Amrizal, Dedi et al. 2018: 43)	Kualitatif	Deskriptif	- Reduksi Data - Penyajian Data - Menyimpulkan Data

Sumber: Peneliti 2026

### 2.1.2 Definisi Administrasi

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “*administration*”, dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis atau mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan *clerical work* (Silalahi, 2013:5).

Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama (Silalahi, 2010:8).

Administrasi public, menurut Chandler (1998:3) dalam “*The Public Administration Dictionary*” menepis makna administrasi sebatas kegiatan ketatausahaan dengan mendefinisikannya sebagai proses di mana keputusan dan kebijakan diimplementasikan”. Pihak-pihak lainnya juga mengartikan administrasi

dalam arti luas. Beberapa definisi administrasi dalam pengertian luas ini dikemukakan antara lain oleh Simon (1992) mengartikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sementara sebelumnya Waldo (1971) mengartikan administrasi sebagai suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. Pengertian luas di Indonesia juga diberikan oleh Siagian (2004), yakni mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Gie (2012:9) Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Mengandung tiga muatan, yakni:

1. Pertama administrasi sebagai seni adalah sebuah proses yang hanya diketahui permulaannya saja, sedang akhirnya tidak ada.
2. Kedua, administrasi mengandung unsur-unsur tertentu, yakni adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan untuk pelaksanaan tugas (termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi, dan unsur lainnya).
3. Ketiga, administrasi sebagai proses kerja sama yang telah ada sejak manusia ada.

Menurut Siagian (2004:2) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang disadari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang sama hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan

tugas-tugas itu. Kedalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan, materi serta sarana lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kerjasama yang rasional dikerjakan oleh dua orang atau lebih dalam mengumpulkan data, pencatatan data dan informasi untuk mencapai tujuan bersama.

### **2.1.3 Pengertian Administrasi Publik**

Pengertian administrasi publik diuraikan secara etimologis, maka publik berasal dari Bahasa Latin *poplicius* yang semula dari kata *populous* atau *people* dalam bahasa inggrisnya yang berarti rakyat. Administrasi juga berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari kata “*ad*” artinya intensif dan *ministrare* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif. Objek dari administrasi publik adalah keseluruhan proses administrasi dibidang kenegaraan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Nawawi (1994:23) mengemukakan, bahwa Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa latin yang terdiri dari *ad + ministrare*, yang secara operasional berarti melayani, membantu dan memenuhi. Dalam Bahasa asalnya terbentuk kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *administration* dan dalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi.

Pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2014:2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan

pengarahan, penciptaan prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Administrasi publik, yang di Indonesia dikenal sebagai Administrasi Negara dan selanjutnya akan disebut administrasi publik dalam tulisan ini, adalah salah satu prinsip dasar dalam operasional pemerintahan. Administrasi publik adalah cabang dari ilmu administrasi yang sangat berhubungan dengan proses politik, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Oleh karena itu, administrasi publik dikenal sesuai dengan sistem politik yang berlaku di suatu negara.

Menurut Rosenbloom (2017:9) mendefinisikan, Administrasi publik adalah pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian

White dalam Waluyo (2007:35) menyatakan, bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Siagian (dalam Waluyo, 2007:37) mengatakan bahwa Administrasi Publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Menurut Pasolong (2011:8) Administrasi publik adalah kerjasama yang

dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan *public* secara efisien dan efektif.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Chandler dan Plano dalam Keban (2013:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua penulis tersebut juga menyatakan, bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang bertujuan mengelola urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditentukan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik berfokus pada pemecahan masalah-masalah publik dengan melakukan perbaikan atau penyempurnaan, terutama dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan negara, termasuk kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan publik. Organisasi, di sisi lain, adalah wadah atau struktur tempat manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, administrasi publik berperan dalam merancang, mengorganisir, dan mengelola organisasi-organisasi publik untuk mencapai tujuan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.1.4 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses identifikasi isu kebijakan, pengembangan proposal

kebijakan, advokasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan juga evaluasi kebijakan yang akan diselenggarakan. Kebijakan publik juga bisa dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan (Deni, 2023). Menurut Pressman & Wildavsky (1973), kebijakan public bersifat strategis dan luas, memiliki fungsi sebagai :

- a. Alat untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.
- b. Sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat.
- c. Instrumen untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.

Kebijakan publik juga bisa berupa aturan yang disetujui untuk mengatur individu, kelompok, dan juga pejabat.

Sejarah singkat kebijakan publik. Sejarah singkat kebijakan publik dapat ditelusuri hingga abad ke-18 SM. Pada waktu itu, kebijakan publik hanya dianggap sebagai kode, bukan undang-undang yang sistematis, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan publik berkembang menjadi alat untuk mendapat tujuan-tujuan masyarakat, sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dan instrumen supaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Perkembangan kebijakan publik juga dipengaruhi oleh perubahan makna dan konsep "publik" dan "kebijakan" itu sendiri. Kebijakan publik jadi lebih kompleks dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan juga membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan tersusun supaya memastikan keberhasilan.

Carl J Federick sebagai mana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan, bahwa:

“kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Deskripsi oleh Carl J Federick yang dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah agar menyelesaikan masalah atau juga mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini di bentuk dalam konteks lingkungan tertentu. Kebijakan ini dirancang dalam konteks lingkungan tertentu yang mempengaruhinya, seperti kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi. Dalam prosesnya kebijakan menghadapi berbagai rintangan, seperti keterbatasan sumber daya atau konflik kepentingan, tetapi juga memiliki peluang seperti dukungan dari masyarakat atau inovasi (Handoyo, 2010).

Sedangkan menurut Anderson (dikutip dari Agustino, 2016:7) menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan”.

Pengertian kebijakan publik menurut Anderson dalam (Agustino, 2016:7) menekankan bahwa kebijakan publik adalah suatu tahapan yang melibatkan tindakan atau kegiatan yang disusun dengan tujuan untuk mencapai maksud tertentu. Proses ini dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu (aktor) yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan ini bermaksud untuk menangani atau menyelesaikan masalah tertentu yang sudah jelas terlihat dan dirasakan oleh Masyarakat (Annas, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian menurut para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah keputusan atau

tindakan yang diperoleh oleh pemerintah ataupun Lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengarahkan, atau mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu.

Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan *good governance*.

Untuk mencapai *good governance* tersebut perlu diketahui dimensi pencapaian yaitu (Hardiansyah, 2018):

“(1) Konsistensi sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya dijalankan secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku, (2) Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang bisa dilakukan oleh *public* atau kelompok yang mempunyai kepentingan. Transparansi informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai, (3) Akuntabilitas pelaksanaan sebuah kebijakan harus bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (4) Keadilan dalam melaksanakan kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (tidak bersifat diskriminatif), (5) Partisipatif yang berarti bahwa masyarakat berperan dalam keterlibatannya pada pelaksanaan kebijakan. Selain itu sebagai penadah pelaksanaan kebijakan, masyarakat juga berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wewenang pelaksanaan kebijakan, (6) Efektivitas berkaitan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang bersangkutan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksanaan kebijakan dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, (7) Efisiensi berhubungan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan.”

### **2.1.5 Pengertian Efektivitas**

Menurut Handoko (2012:7) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah diberikan. Yulita (2016) berpendapat, bahwa Efektivitas adalah penggunaan sejumlah sumber daya sarana dan prasarana yang telah ditentukan sebelumnya secara sadar untuk menghasilkan lebih banyak barang untuk jasa yang diberikan. Efektivitas menunjukkan

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil suatu kegiatan mendekati tujuan, berarti efeknya tinggi.

Efektivitas menurut Bastian (2010) dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian berbagai tujuan tertentu. Selanjutnya, efektivitas adalah hubungan diantara output dan tujuan, dan efektivitas dilihat dengan sejauh mana tingkat output dari suatu peraturan dimaksudkan dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian efektivitas adalah pengukuran tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa memperhatikan tenaga, waktu, biaya, pemikiran, alat, dan faktor lainnya yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pendapat di atas efektivitas lebih tertuju pada tujuan serta aspek organisasi. Oleh karena itu, organisasi telah mencapai efektivitas jika mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan keefektivitasan Program. Budiani (2007:53) menyatakan ukuran keefektivitasan yaitu:

“(1) Ketepatan tujuan Program: Sejauhmana peserta Program setuju dengan tujuan yang telah ditetapkan, (2) Sosialisasi Program: kemampuan penyelenggara Program untuk menyelenggarakan Programnya sehingga informasi tentang penawaran Programnya dapat dikomunikasikan kepada masyarakat umum, khususnya kepada peserta Program yang dituju, (3) Tujuan Program: Tingkat kesepakatan antara hasil implementasi Program dan tujuan Program yang telah ditetapkan sebelumnya, (4) Pemantauan Program: kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan Program sebagai bentuk perhatian kepada peserta Program.”

### 2.1.5.1 Aspek-Aspek Efektivitas

Menurut Muasaroh (2010:13) ada beberapa aspek efektivitas, yaitu:

1. Aspek tugas dan fungsi, yaitu lembaga atau organisasi dianggap efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan Program pembelajaran dikatakan efektif apabila mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat.
2. Aspek rencana atau Program, yaitu rencana studi terProgram, dimana rencana atau Program tersebut dianggap berlaku pada saat dilaksanakan.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas Program juga dapat ditemukan pada efektivitas dan tidak efektifan peraturan yang ditetapkan untuk menjaga kelangsungan proses kegiatan. Aspek ini mengandung aturan. Artinya, jangka waktu atau peraturan tersebut sudah efektif habis masa berlakunya.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, tujuan Program tersebut dapat dicapai maka suatu Program kegiatan dikatakan efektif, penilaian ini tercermin dari hasil yang dicapai.

Menurut Gipson et al. (1994) Aspek efektivitas meliputi:

“(1) Produktivitas (hasil yang dicapai), (2) Efisiensi (penggunaan sumber daya secara optimal), (3) Kepuasan (kepuasan anggota organisasi atau masyarakat), (4) Adaptasi terhadap perubahan Kelangsungan hidup organisasi (*survival*)”

### 2.1.6 Program

Gambaran umum Program merupakan kumpulan instruksi, rencana kegiatan, pedoman, cara maupun daftar yang berurutan. Program yang hasilnya memiliki beragam pengertian dari berbagai aspek mana istilah tersebut digunakan. Apabila mengacu pada KBBI, terdapat definisi yang tertera yaitu, Program sebagai salah perencanaan dari asas dan usaha, Pemakaiannya bisa dalam bidang perekonomian, ketatanegaraan, dan juga masih banyak lagi (Wibawani et al., 2021). Program juga merupakan perancangan yang disusun oleh individual atau kelompok supaya tercapai prinsip yang sudah ditetapkan sebelumnya. Program bisa diinisiasi

berlandaskan kebijakan yang sudah dirumuskan, sesudah itu diimplementasikan ke dalam bentuk Program tertentu.

Kata “Program” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “Prorame” yang mempunyai arti rencana atau acara. Dalam konteks konseptual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, “Program” dimaknakan sebagai suatu rancangan yang melibatkan asas dan sebuah usaha yang akan dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu (Arumdani et al., 2021).

Menurut Hans Hochholzer dalam Hetzer, 2012:11) menjelaskan :

“Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu hal atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu Program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. susunan perencanaan Program-Program tersebut disebut sebagai Program kerja”.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa Program merupakan kumpulan aktivitas nyata yang disusun secara sistematis dan terpadu supaya mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan Program biasanya melibatkan instansi pemerintah yang bisa bekerja sama bersama pihak swasta dan masyarakat agar memastikan keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Program dirancang berdasarkan tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap kegiatan yang disusun dalam sebuah Program memiliki tujuan yang jelas. Program juga mencakup sarana atau sumber daya yang dibutuhkan supaya mendukung pencapaian tujuan tersebut, secara keseluruhan rancangan perencanaan dari berbagai Program ini dikatakan sebagai Program kerja (Akbar & Rakhmayudhi, 2022), yang bermakna sebagai panduan operasional untuk merealisasikan target dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Tayibnabis (2000:9) mengartikan:

“Program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dengan demikian dapat Program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dengan proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang”.

Menurut penjelasan di atas bahwa Program merupakan sebuah upaya tersusun yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan maksud supaya tercapai hasil atau dampak tertentu. Program meliputi serangkaian aktivitas yang tersusun dengan hati-hati supaya mencapai tujuan tertentu, proses pelaksanaannya bersifat berkesinambungan sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Program biasanya terjadi dalam kerangka organisasi baik formal maupun informal yang memberikan struktur dan sumber daya guna mendukung pelaksanaannya. Berdasarkan teori para ahli di atas, maka pengertian Program merupakan produk dari sebuah perencanaan yang berdasarkan data yang valid dan mencukupi. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang disusun supaya tercapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan Program. Perumusan Program adalah perincian dari rencana besar, yang mencakup berbagai macam kegiatan yang disusun supaya tercapai tujuan pembangunan nasional. Program ini menyantumkan elemen-elemen seperti jenis kegiatan, pelaksana, lokasi, jadwal, sumber daya yang dipakai, dan tolak ukur untuk mengevaluasi hasil. Keseluruhan, Program kerja berfungsi sebagai panduan bagi manajemen dalam mengarahkan kegiatan dan memastikan bahwa setiap langkah yang dipilih sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Dengan adanya Program kerja yang terstruktur, organisasi

bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggapai hasil yang diinginkan.

#### **2.1.6.1 Konsep Efektivitas Program**

Efektivitas Program adalah sebuah cara untuk menilai sejauh mana suatu Program berlangsung, untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan sebelumnya. Makmur (2025:6) berpendapat bahwa efektivitas Program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya memperlihatkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang telah dicapai, dimana dijelaskan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang sudah dicapai. Tetapi efektivitas Program merupakan tingkat perwujudan dari perumusan tujuan yang ditentukan oleh suatu kelompok bahwa di dalamnya terdapat tugas-tugas pokok (Siregar et al., 2023).

Siagian (2025:34) turut mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas Program sebagai berikut:

1. Keterjelasan tujuan
2. Keterjelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan
5. Penyusunan Program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti beranggapan bahwa efektivitas Program memiliki beberapa faktor seperti keterjelasan tujuan, keterjelasan strategi

pencapaian tujuan, proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap, perencanaan, penyusunan Program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan system pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Efektivitas Program akan tercapai apabila unsur-unsur tersebut dapat diperhatikan.

Dijten Binlantas Depnaker, 1993, dalam (Setiawan, 1998) menjelaskan :

“Efektivitas Program adalah suatu penilaian terhadap tingkat kesesuaian Program yang merupakan salah satu cara dalam upaya untuk mengukur sebuah efektivitas pada suatu Program. Efektivitas pada sebuah Program ini dapat diketahui yaitu dengan membandingkan tujuan Program dengan output dari Program”

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa efektivitas Program merupakan penilaian kepada sejauh mana tujuan Program tercapai dengan membandingkan hasil atau output Program dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jikalau hasilnya sesuai dengan tujuan Program tersebut dianggap efektif tetapi jika tidak Program tersebut dinilai kurang efektif, penilaian ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan Program dalam memenuhi targetnya.

#### **2.1.6.2 Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai dari dana desa, secara khusus diperuntukan kepada keluarga miskin atau kurang mampu yang tinggal di desa dan belum mendapatkan dukungan dari Program lain. Program (BLT-DD) sendiri adalah Program yang di buat oleh pemerintah pusat, yang kewenangannya di serahkan kepada desa untuk membantu masyarakat miskin di desa (Iman et al., 2024). Tujuan dari bantuan langsung tunai dana desa sendiri adalah untuk

membantu masyarakat miskin atau kurang mampu selain itu bertujuan juga untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga meringankan perekonomian keluarga yang dirasa miskin atau kurang mampu (Kurnianto, 2018).

Kriteria Penerima BLT-DD desa Garumukti, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstream
2. Punya sakit kronis/menahun
3. Keluarga dengan anggota rumah tangga lanjut usia
4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Dari kriteria Penerima bantuan langsung tunai di Desa Garumukti, data diatas disepakati melewati forum Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah desa di Desa Garumukti sendiri diadakan setiap setahun sekali dan membahas banyak hal salah satunya, terkait dengan Program BLT-DD ini.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

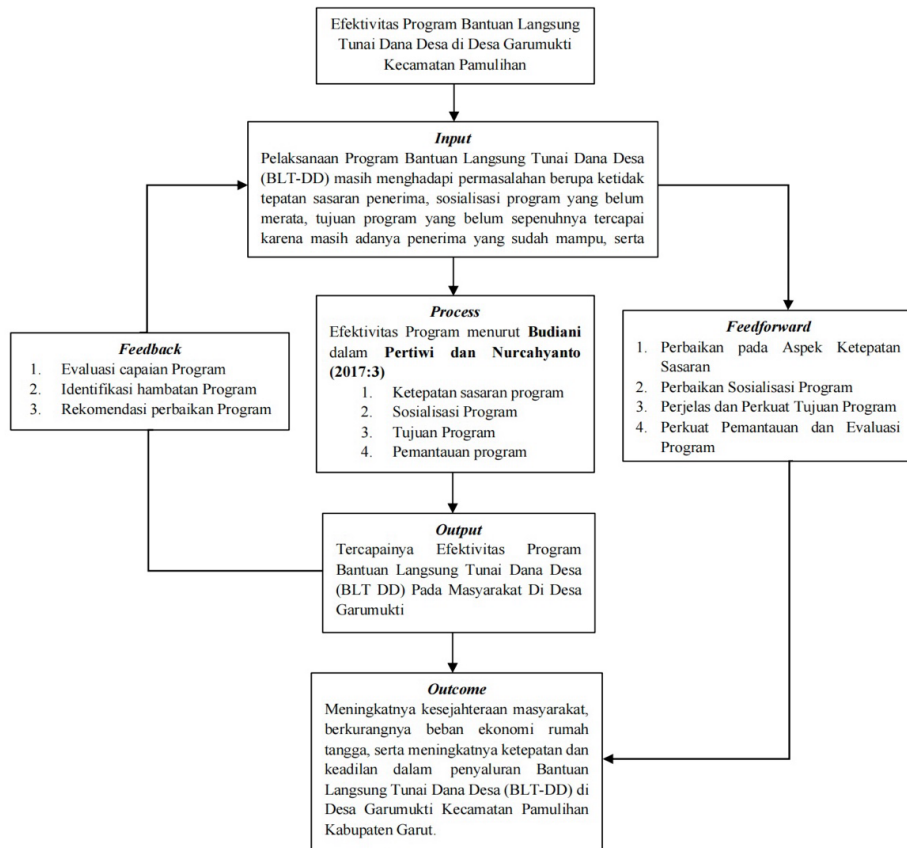
Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir terkait penelitian yang ingin diteliti oleh penulis agar penelitian menjadi terarah dan sistematis dalam mencapai tujuan penelitian. Pada kerangka pemikiran ini, peneliti akan membahas objek penelitian dan objek permasalahan mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan.

Deskripsi mengenai kerangka untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Efektivitas di sini menjadi tolak ukur sejauh mana Program tersebut berjalan dengan efektif. Maka dari itu Budiani dalam

Pertiwi & Nurcahyanto (2017) menyatakan, bahwa untuk mengetahui efektivitas bisa dilakukan dengan memakai 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran Program, ketepatan sasaran merujuk pada sejauh mana suatu Program berhasil mencapai kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan manfaatnya. Sebuah Program dibuat harus berdasarkan kebutuhan, dikatakan tepat sasaran jika Program dan kebutuhan masyarakat sebanding.
2. Sosialisasi Program, sosialisasi Program sendiri merupakan proses penyampaian sebuah informasi tentang suatu Program terhadap pihak-pihak yang bersangkutan atau terdampak, dengan tujuan supaya meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat.
3. Tujuan Program, mengenai dengan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan Program dan tujuan Program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program, pemantauan Program merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menilai data secara berkala supaya memastikan, bahwa suatu Program tersebut sesuai rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.

Supaya kerangka berpikir di atas bisa lebih jelas dan lebih mudah di mengerti, peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir ke dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Proposisi

1. Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut ditentukan oleh ketepatan sasaran Penerima, sosialisasi Program, kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan Program, serta pemantauan Program oleh pemerintah desa, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dan berkurangnya beban ekonomi rumah tangga.

2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, seperti kesiapan aparatur desa, keakuratan data Penerima, mekanisme penyaluran, serta tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya menentukan tercapainya keadilan dan ketepatan dalam distribusi bantuan.